

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “Pangkatangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Di Luar Pemilihan Umum Proses dan Dampaknya Pada Masa Awal Pemerintahan Orde Baru 1968-1976”. Kesimpulan berikut merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis di dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini juga memuat saran yang dapat digunakan oleh para pembaca.

5.1. Kesimpulan

Pangkatangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilakukan pada masa awal pemerintahan Orde Baru dipengaruhi oleh adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 dimana pada saat itu terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam Gerakan tersebut. Selain adanya penangkapan adanya pelaksanaan terhadap UUD 1945 yang didalamnya diatur untuk melakukan pangangkatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan mengangkat orang-orang yang dianggap mewakili golongan tertentu hingga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat bias dianggap merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia.

Proses pangangkatan dilakukan pada tahun 1971 beriringan dengan hasil pemilu 1971. Hasil pemilu menjadi acuan dalam proses pangangkatan anggota berdasarkan imbalan hasil Pemilihan Umum sehingga setiap peserta bias menempatkan minimal satu wakilnya dalam majelis. Proses pangangkatan ini diatur dalam UU no 16 yang dikeluarkan tahun 1969 yang memperjelas mengenai mekanisme pangangkatan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Brdasarkan hasil PEMILU 1971 Golongan Karya keluar sebagai pemenang dengan berhasil menempatkan banyak wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian secara otomatis menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pangangkatan anggota MAjelis Permusyawaratan Rakyat di luar Pemeilihan Umum unsur golongan fungsional menempatkan banyak anggotanya didalam majelis melalui ABRI, Golongan Fungsional non ABRI, serta perwakilan daerah yang diman golongan golongan tersebut merupakan pihak yang sama dengan Golongan Karya.

Komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dijumlahkan dari Anggota DPR dan pengangkatan diluar Pemilihan Umum ini secara komposisi menempatkan Sekber Golkar sebagai pihak yang memiliki wakil yang paling banyak di MPR. Komposisi MPR ini menunjukkan dominasi dari Sekber Golkar sehingga perumusan produk hukum yang dirumuskan dalam bisa didominasi oleh GOLKAR. Dominasi Sekbergokar dalam MPR dianggap memberikan kenyamanan pada pemerintah dikarenakan posisi Sekber Golkar adalah pihak yang bias dikatakan berada dibawah Pemerintahan saat itu, sehingga pemerintah memiliki control yang kuat terhadap lembaga permusyawaratan dan perwakilan pada saat itu.

5.2. Rekomendasi

Pertama, untuk lembaga Universitas Pendidikan Indonesia, tulisan ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai Pengangkatan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Di Luar Pemilihan Umum Proses dan Dampaknya Pada Masa Awal Pemerintahan Orde Baru 1968-1976. Untuk Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, nilai-nilai yang terkandung dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon pendidik untuk lebih memahami arti perjuangan dan hidup saling berdampingan secara damai dalam masyarakat. Untuk Departemen Pendidikan Sejarah, tulisan ini diharapkan mampu memperkaya tulisan dan sumber bacaan mengenai Pengangkatan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Di Luar Pemilihan Umum Proses dan Dampaknya Pada Masa Awal Pemerintahan Orde Baru 1968-1976, serta dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kedua, untuk lingkungan sekolah, nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan mempertahankan integrasi pada pembelajaran sejarah adalah mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai perjuangan dalam mempertahankan integrasi Timor Timur, nilai saling menghargai perbedaan, dan saling memaafkan sehingga dapat hidup dengan harmonis tanpa menimbulkan konflik di lingkungannya. Materi mengenai Pemerintahan Orde Baru ini terdapat dalam silabus kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah kelas XII semester I, mengenai orde baru dan reformasi dengan kompetensi dasar:

3.5 Mengevaluasi kehidupan politik dan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.

3.6 Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi.

3.7 Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Ketiga, bagi seluruh masyarakat, agar dapat memberikan perhatian lebih terhadap proses berjalannya pemerintahan yang ada. Masyarakat pula mulai sadar akan perhatian terhadap berbagai situasi politik yang terjadi sehingga bisa menyimpulkan dan melakukan analisis terhadap berbagai peristiwa politik sehingga masyarakat tidak mudah dibohongi atau diarahkan opininya oleh para elit politik.

Keempat, untuk keperluan penelitian selanjutnya, penulis mengusulkan beberapa pokok kajian yang menarik untuk dibahas lebih mendalam. Hal tersebut antara lain: Pertama, Peranan ABRI dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan. Kedua, Sikap Partai Politik dalam menyikapi kekalahan pada PEMILU pertama Orde Baru. Ketiga, perkembangan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara sistem dan kedudukan dari masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Kepada para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan ini, diharapkan mampu memanfaatkan celah tersebut serta mampu melihat dari berbagai sisi dan fokus pada satu persoalan sehingga akan didapatkan penjelasan yang baik dan mendalam.